



Penanganan Keamanan Di Selat Malaka Melalui Operasi Udara Eyes In The Sky (EIS) Oleh TNI Angkatan Udara

(Evaluation Of The Security Handling Program Of Eyes In The Sky (Eis) Air Operation In The Malaca Strait By The Indonesian Air Force)

Sekti Ambarwaty^{1*}, M. Halimah², Ramot C.P. S.³, Buddy Suseto⁴, Ary Pitoyo S.⁵

^{1,2,3} Program Studi Magister Terapan Strategi Operasi Udara, Seskoau, Indonesia

E-mail: apsara_7305@gmail.com

^{4,5} Program Studi Strategi Pertahanan Udara, Unhan RI, Indonesia

Abstract— Peran TNI AU sebagai kekuatan matra udara dibidang pertahanan dalam melaksanakan Operasi Udara salah satunya adalah dalam penyelenggaraan OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Dalam pelaksanaan kegiatan operasi selalu mendasar pada kebijakan dan keputusan politik negara. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh TNI AU adalah melaksanakan pengamanan di Selat Malaka, TNI AU telah bergabung dengan beberapa negara dalam kawasan di sekitar Selat Malaka dalam menyelenggarakan operasi udara EIS (Eyes in The Sky), yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Dengan masih adanya fenomena terjadinya pelanggaran di Selat Malaka sampai dengan saat ini, sehingga peneliti membuat perumusan masalah "Evaluasi Kebijakan Penanganan Keamanan di Selat Malaka melalui Operasi EIS oleh TNI Angkatan Udara". Tujuan dari penelitian ini adalah agar diperoleh gambaran bagaimana bentuk evaluasi yang diperlukan TNI Angkatan Udara dalam penyelenggaraan kegiatan Patroli Udara EIS, sesuai dengan teori yang telah digunakan sebagai referensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Saran secara Praktis, operasi EIS yang selama ini sudah terlaksana secara rutin dan sesuai jadwal yang telah dibuat dengan koordinasi antar negara, diharapkan mampu terselenggara secara komprehensif bersama stakeholder lainnya, yang memiliki keterkaitan tugas dalam pengamanan Selat Malaka. Secara Teoritis, peneliti selanjutnya dapat membahas mengenai mekanisme pelaksanaan EIS yang lebih bisa memberikan kontribusi terhadap keamanan wilayah Selat Malaka.

Keywords— Eyes in The Sky (EIS), Selat Malaka, TNI AU

Abstrak— The role of the Indonesian Air Force as an air force in the field of defense in carrying out air operations, one of which is implementing OMSP (Military Operations Other Than War). In carrying out operational activities, it is always based on state policies and political decisions. One of the efforts carried out by the Indonesian Air Force is to carry out security in the Malacca Strait; the Indonesian Air Force has joined several countries in the area around the Malacca Strait in organizing the EIS (Eyes in The Sky) air operation, which has been ongoing since 2005. the phenomenon of violations in the Malacca Strait until now, researchers formulate the problem "Evaluation of Security Handling Policies in the Malacca Strait through Operation EIS by the Indonesian Air Force." This study aims to obtain an overview of the form of evaluation needed by the Indonesian Air Force in implementing EIS Air Patrol activities by the theory that has been used as a reference. The research method used is qualitative. Practical advice, the EIS operation, which has been carried out routinely and according to a schedule that has been made with coordination between countries, is expected to be able to be carried out comprehensively with other stakeholders who have related tasks in securing the Malacca Strait. Theoretically, further researchers can discuss the mechanism for implementing EIS, which can contribute more to the security of the Malacca Strait region.

Kata Kunci— Eyes in The Sky (EIS), Indonesian Air Force, Malacca Strait

*Penulis Korespondensi (nama penulis)

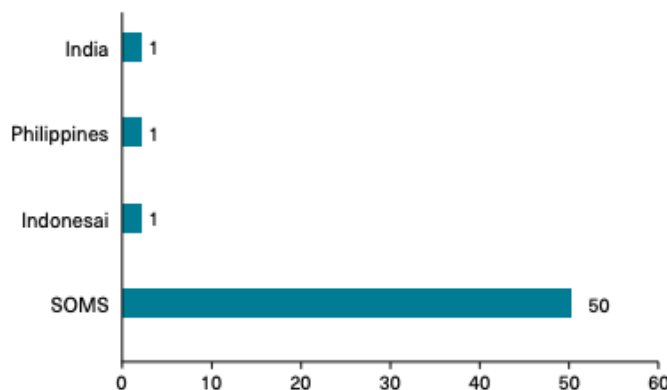
E-mail: penulis@perguruantinggi.ac.id

I. PENDAHULUAN

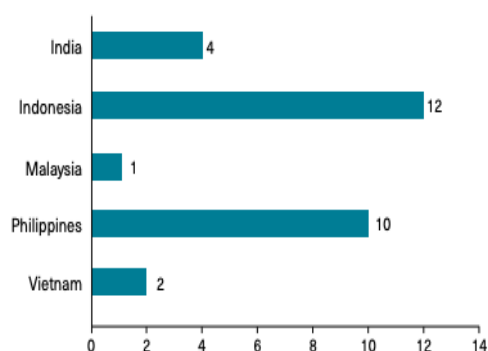
Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang berada di dunia terletak di antara dua samudera dan dua benua, serta memiliki posisi geografis dan strategis. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Indonesia juga memiliki perairan yang merupakan salah satu faktor penting dalam perdagangan internasional, sehingga kondisi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap adanya sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang akan berdampak pada kondisi stabilitas nasional. Sebagai negara kepulauan dan negara maritim, Indonesia sangat memiliki peranan dalam menciptakan keamanan di kawasan, termasuk keamanan maritim dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Oleh karena itu, tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan, dan pertahanan yang handal sangat diperlukan [1]. Selat Malaka merupakan bagian kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ditinjau dari posisinya Selat Malaka merupakan perairan yang berada diantara daratan Sumatra dan semenanjung Malaysia. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 mencantumkan bahwa salah satu peran TNI AU dalam melaksanakan Misi Operasi Militer Selain Perang adalah turut serta pelaksanaan misi pengamanan dalam pelayaran [2].

Kerjasama yang dilakukan dalam rangka pengamanan Selat Malaka adalah *Multilateral Coordinated Patrol* yang disepakati oleh empat negara yaitu Malaysia, Indonesia Thailand dan Singapura karena mengingat pentingnya keamanan di wilayah Selat Malaka bagi negara-negara tersebut pada khususnya dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Kerjasama tersebut berisi kesepakatan yang dari terdiri dari Patroli Laut Selat Malaka (*Malacca Sea Strait Patrol*) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2004, *Eyes in The Sky* (EIS) yang mulai diluncurkan pada tahun 2005 dan *Intellegence Exchanges Group* (IEG) pada tahun 2006 (*Standard Operations Procedure EIS*, 2013). EIS (*Eyes In The Sky*) adalah pelaksanaan patroli udara laut gabungan di atas Selat Malaka dan Selat Singapura dengan sektor wilayah sasaran yang telah dikoordinasikan dengan negara peserta.

Namun, meskipun kerjasama penanganan keamanan di Selat Malaka melalui Patroli Udara EIS sudah berlangsung dalam waktu yang relative lama, kenyataan yang ada sampai dengan saat ini masih terdapat angka pelanggaran di Selat Malaka. Peneliti mencoba untuk menganalisa lebih lanjut terhadap data yang diperoleh melalui patroli Udara EIS TNI AU, dengan data pelanggaran yang masih terjadi di Selat Malaka. Dan selanjutnya berdasarkan data tersebut akan dilaksanakan evaluasi terhadap penanganan keamanan lebih lanjut melalui pelaksanaan Patroli Udara EIS oleh TNI Angkatan Udara dalam pengamanan selat malaka. Berdasarkan data dari ReCAAP ISC Annual Report 2021 diperoleh data yang diantaranya melaporkan kejadian atau insiden pelanggaran di Selat Malaka atau SOMS (*Straits Of Malacca and Singapore*). Sebagai wujud dari bentuk pengukuran terhadap *effect* yang dihasilkan dari kegiatan pengamanan Selat Malaka oleh TNI AU, tentunya diperlukan adanya suatu bentuk evaluasi terhadap kegiatan pengamanan Selat Malaka oleh TNI AU dalam Patroli Udara EIS. Mekanisme evaluasi sebaiknya dilaksanakan dengan melihat kembali bagaimana seharusnya pelaksanaan Misi EIS ini dilaksanakan secara ideal, procedure apa saja yang harus dilaksanakan oleh operator atau instansi pelaksana lainnya yang berada langsung dilapangan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengakhiran sampai dengan tahap pelaporan.



Gambar 1. Grafik Insiden Di Atas Kapal Saat Berlayar (2021) Sumber: (RECAAP, 2021)



Gambar 2. Grafik Insiden Di Atas Kapal Saat Berlabuh (2021) Sumber: (RECAAP,2021)

II. LANDASAN TEORI

Terdapat dua sub pokok bahasan dalam tinjauan pustaka ini yaitu diantaranya landasan teori dan kerangka pemikiran.

A. Teori Evaluasi Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Aktivitas tersebut berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan yang bersifat kompleks, tidak linear dan pada dasarnya bersifat politis [3].

B. Teori Keamanan Maritim

Menurut McNicholas (2008) Keamanan Maritim adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemilik, operator, administrator kapal, fasilitas pelabuhan, instalasi lepas pantai, serta organisasi kelautan untuk melindungi wilayah laut dari pembajakan, sabotase, penyitaan, pencurian, dan gangguan lainnya [4]. Konsep Maritime Domain Awareness (MDA) pada intinya merupakan pemahaman secara komprehensif mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan maritim dan mempengaruhi keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan, dan juga akan menjadi kunci dalam menyusun kebijakan kelautan di dunia serta menjamin keselamatan perdagangan maritim (Marsetio, 2013). Dalam rangka menjamin keamanan maritim, diperlukan kemampuan dan kekuatan negara yang cukup memadai untuk menangkal segala bentuk ancaman yang mengganggu kestabilan keamanan maritim. Dan hal itu dapat diawali dengan baik jika negara

memiliki pemahaman yang baik mengenai laut dan membangun orientasi dalam isu keamanan maritim dari skala internasional [5].

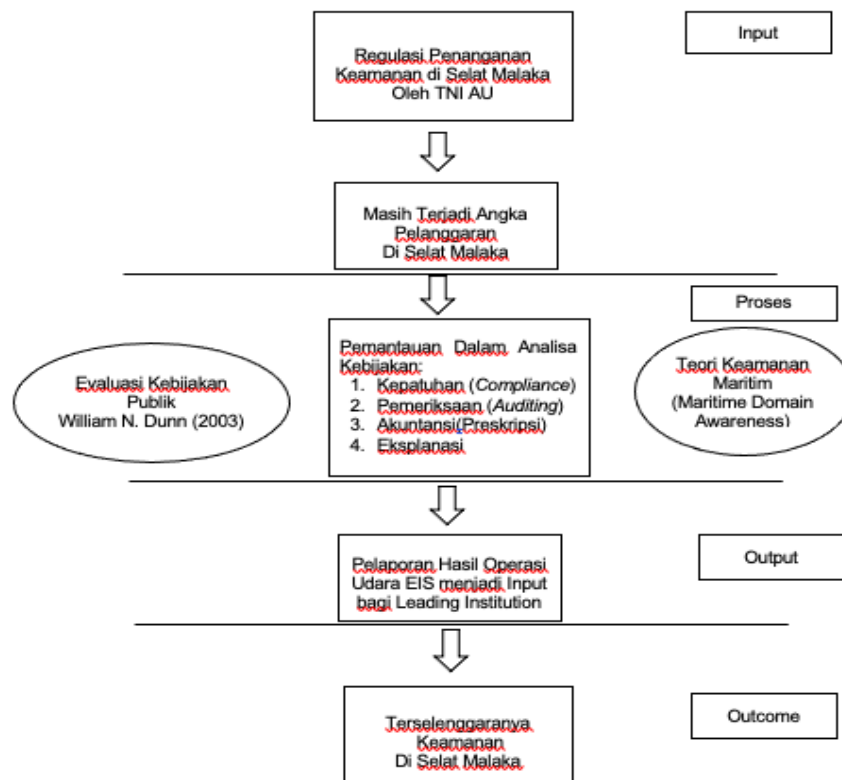
C. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah suatu kerangka yang menguraikan alur penelitian secara logis. Dengan kata lain, kerangka pemikiran ini akan menjabarkan pemikiran yang akan mengarah kepada rumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

III. METODE/MODEL YANG DIUSULKAN

A. Arsitektur Model Secara Umum

Dalam menerapkan metode kualitatif ini, peneliti mencari informasi perihal apa saja dan bagaimana yang dilakukan oleh TNI AU dalam rangkaian pelaksanaan Patroli EIS guna pengamanan di Selat Malaka. Data tersebut diperoleh dari data primer yaitu informan/subjek penelitian serta data sekunder yaitu dokumen pendukung yang diperoleh dari informan/subjek penelitian atau internet [6].



Gambar 3. Kerangka Pemikiran (Sumber: Peneliti, 2022)

IV. HASIL/IMPLEMENTASI MODEL DAN PEMBAHASAN

EIS (*Eyes In The Sky*) adalah pelaksanaan patroli udara laut gabungan di atas Selat Malaka dan Selat Singapura dengan sektor wilayah sasaran yang telah dikoordinasikan dengan negara peserta. Pelaksanaan Kerjasama Patroli EIS merupakan salah satu upaya pertahanan yang

dilakukan oleh setiap negara peserta untuk secara bersama-sama menimbulkan rasa saling mempercayai antar negara. Dalam pelaksanaan patroli Udara EIS, masing-masing negara akan mengirimkan personel CMPT (*Combined Mission Patrol Team*) yang akan ikut onboard pada pesawat negara lain yang akan melaksanakan misi patroli Udara EIS. Keberadaan patroli udara EIS yang merupakan bagian dari Malacca Strait Patrol (MSP) telah dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. Patroli terkoordinasi ini pelaksanaannya melibatkan empat negara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Selain melaksanakan Operasi Militer Selain Perang guna membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, peran TNI Angkatan Udara diperkuat lagi dengan adanya Operasi Intelijen yang menjadi bagian dari Operasi Udara yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Bentuk operasi udara dalam operasi intelijen adalah Operasi Udara Intelijen Pengamatan dan Pengintaian (OUIPP) yang dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi udara dan operasi lainnya. OUIPP (Operasi Udara Intelijen Pengamatan dan Pengintaian) meliputi tiga operasi yaitu Operasi Intelijen Udara (Ops Intelud), Operasi Pengamatan Udara (Ops Matud), Operasi Pengintaian Udara Intud. Operasi Udara EIS mengambil peran dalam Operasi Pengamatan Udara dengan menghasilkan laporan-laporan terhadap hasil patroli dari wilayah sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya [7].

Kehadiran TNI Angkatan Udara melalui patroli EIS (*Eyes In The Sky*) adalah bertugas melaksanakan patroli udara maritim yang meliputi pengamatan, pengintaian udara dan pemotretan / foto udara secara terkoordinasi, yang salah satunya dilaksanakan Skadron Udara 2 yang bermarkas di Lanud Halim Perdanakusuma. Dengan adanya interoperability antar unsur di sasaran di Selat Malaka, seharusnya data yang didapatkan dari hasil foto udara oleh TNI Angkatan Udara bisa menjadi informasi bagi unsur laut yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Laut. Dengan menghadirkan kecepatan dalam penanganan pelanggaran, maka akan menimbulkan deterrence effect yang diberikan oleh operasi EIS serta akan mempersempit peluang pelaku kejahatan dalam melakukan pelanggaran di Selat Malaka.

Terdapat tiga bagian penting dalam penyelenggaraannya, bagian pertama yaitu MSSP yang merupakan domain patroli laut oleh TNI Angkatan Laut. Selanjutnya bagian kedua adalah IEG yang merupakan satuan tugas pengumpulan data informasi intelijen yang berkaitan dengan segala sumber informasi yang diperlukan bagi pelaksana kegiatan patroli Kerjasama pengamanan Selat Malaka. Dan bagian ketiga adalah EIS yang merupakan kegiatan pengamanan Selat Malaka yang mulai tahun 2005 sampai dengan saat ini menjadi bagian dari misi Operasi yang di laksanakan oleh TNI Angkatan Udara. Dalam mendukung pelaksanaan Operasi Udara EIS di negara Indonesia, telah dibentuk Pusat operasi EIS dan MAA (*Monitoring Action and Agency*). Fungsinya adalah untuk Pusat Operasi dalam mengoordinasikan jadwal penerbangan dengan Pusat Operasi dari negara penyelenggara yang lainnya. Sedangkan fungsi dari MAA adalah untuk pengawasan dan komunikasi selama misi berlangsung.



Gambar 4. Peta Operasi

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa selama patroli udara berlangsung, crew pesawat sangat jarang bisa berkomunikasi dengan frekuensi MAA yang telah ditetapkan sebagai pusat operasi dan informasi selama kegiatan operasi berlangsung. Sehingga kegiatan operasi hanya bersifat tunggal atau satu arah yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Sesuai dengan teori William N. Dunn, yang mengemukakan perlunya pemantauan dalam analisis kebijakan dengan menggabungkan empat prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, antara lain kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi dan eksplanasi. Teori ini sangat diperlukan guna keberlanjutan kebijakan dalam penyelenggaraan misi *Eyes In The Sky* oleh TNI Angkatan Udara, sehingga peran yang dihadirkan oleh kekuatan udara bisa memberikan kontribusi bagi kegiatan pengamanan di Selat Malaka.

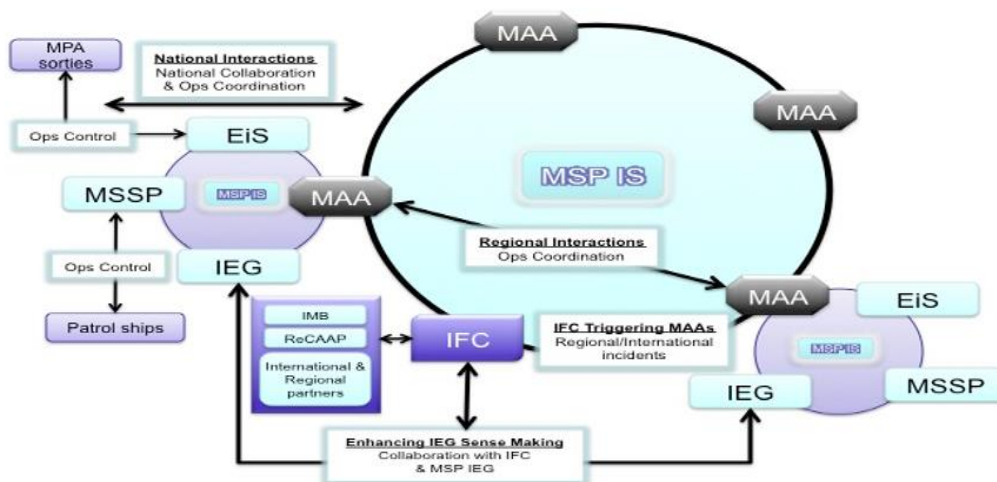
A. Kepatuhan (Compliance).

Sesuai hasil analisa berdasarkan teori evaluasi kebijakan pada penerapan nilai kepatuhan, seharusnya penerapan standar dan prosedur yang telah menjadi kesepakatan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan menjadi perhatian dalam pelaksanaan di lapangan, baik hal itu dilaksanakan oleh pihak administrator program, para staf, dan para pelaku itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi pemantauan atau monitoring, tentunya perlu dilaksanakan transparansi data yang berkaitan dengan jenis dan jumlah pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu tertentu di Selat Malaka, dengan data yang diberikan oleh EIS yang merupakan operasi sepanjang tahun dari TNI AU. Program monitoring terhadap sasaran yang diperoleh dari hasil patroli udara EIS selanjutnya disandingkan dengan adanya data pelanggaran yang terjadi di Selat Malaka sehingga bisa dihasilkan informasi tentang peran atau kualitas nyata yang bisa dihasilkan dari pelaksanaan misi Patroli Udara EIS tersebut.

B. Pemeriksaan (Auditing)

Sesuai hasil analisa berdasarkan teori evaluasi kebijakan pada penerapan nilai pemeriksaan, seharusnya kegiatan pemeriksaan dalam pelaksanaan Misi Operasi Udara EIS perlu untuk dilaksanakan. Hal ini ditujukan guna menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan dalam penyelenggaraan operasi udara tersebut telah sampai kepada tujuan pengamanan di Selat Malaka itu sendiri. Kegiatan pemeriksaan dalam pelaksanaan Misi Operasi Udara EIS dilaksanakan dengan melihat hasil apa yang ditemukan atau didapat selama

kegiatan berlangsung, kemudian melihat bagaimana tingkat pelanggaran yang terjadi di Selat Malaka dalam waktu tertentu yang sudah ditetapkan sebagai parameter dalam pemeriksaan.



Gambar 5. Style MSP Operations and Coordination Linkages (Malacca Straits Patrol Standard Operating Procedures, 2020)

Dalam bagan di atas telah dijelaskan bagaimana mekanisme Operasi Penanganan di Selat Malaka yang tergabung dalam MSP (*Malacca Strait Patrol*) seharusnya terwujud. Terdapat tiga bagian penting dalam penyelenggaraannya, bagian pertama yaitu MSSP yang merupakan domain patroli laut oleh TNI Angkatan Laut. Selanjutnya bagian kedua adalah IEG yang merupakan satuan tugas pengumpulan data informasi intelijen yang berkaitan dengan segala sumber informasi yang diperlukan bagi pelaksana kegiatan patroli Kerjasama pengamanan Selat Malaka. Dan bagian ketiga adalah EIS yang merupakan kegiatan pengamanan Selat Malaka yang mulai tahun 2005 sampai dengan saat ini menjadi bagian dari misi Operasi yang di laksanakan oleh TNI Angkatan Udara [8].

C. Akuntansi

Sesuai hasil analisa berdasarkan teori evaluasi kebijakan pada penerapan nilai akuntansi, hal ini dilakukan melalui perhitungan atas terjadinya perubahan sosial/ekonomi dalam bentuk deterrent effect yang dihasilkan melalui kegiatan Operasi Udara EIS. Melalui kegiatan Patroli Udara EIS yang dilaksanakan oleh TNI AU sebagai bagian dari Operasi Udara dan menjadi operasi sepanjang tahun bagi Koopsud I, maka seharusnya bisa melihat dan memperhitungkan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh TNI Angkatan Udara terhadap berkurangnya jumlah pelanggaran yang ada di Selat Malaka. Apakah dengan kegiatan yang dilakukan tersebut telah dijalankan dengan benar sehingga bisa dilanjutkan kepada para pemangku kepentingan berikutnya atau tidak, baik pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelanggaran kedaulatan atau kejahatan transnasional lainnya.

D. Eksplanasi

Melalui pemantauan pelaksanaan kegiatan Patroli Udara EIS, maka akan dihasilkan suatu informasi apakah program tersebut berfungsi dengan baik dalam mengurangi terjadinya pelanggaran di Selat Malaka atau tidak. Dan penting untuk menyajikan data secara real dan transparan tentang informasi-informasi yang telah dihimpun para pelaku atau operator tersebut. Sehingga bisa menjadi kesimpulan atas kondisi yang terjadi akibat kebijakan dalam pelaksanaan misi EIS tersebut. Pemantauan pelaksanaan kegiatan Patroli Udara EIS, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran, tentunya akan memberikan gambaran dan informasi sejauh mana kontribusi yang dihadirkan oleh TNI Angkatan Udara dalam penanganan

keamanan di Selat Malaka. Dengan adanya penjelasan yang berkaitan dengan proses selama patroli berlangsung serta kendala ataupun hambatan yang dialami oleh pihak administrator program, para staf, dan para pelaku di lapangan, seharusnya bisa menjadi bagian dari bentuk evaluasi yang bisa dilaksanakan guna memperbaiki kondisi yang ada.

V. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menyusun pembahasan terhadap rumusan masalah, maka peneliti menarik kesimpulan umum dari penelitian penanganan keamanan di Selat Malaka melalui operasi udara Eyes In The Sky (EIS) oleh TNI Angkatan Udara yaitu perlunya evaluasi kebijakan terhadap implementasi pelaksanaan operasi udara EIS yang selama ini telah menjadi bagian dari operasi rutin TNI Angkatan Udara.

Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan patroli udara EIS sebagai bagian dari Malaca Strait Patrol (MSP), antara lain pola komunikasi dan kerjasama serta koordinasi yang masih belum terwujud antar unsur pelaksana satu dengan yang lainnya. Kondisi ini membuat peran yang diberikan oleh unsur udara belum bisa optimal dan efektif dalam mengurangi angka terjadinya pelanggaran atau kejahatan transnasional yang terjadi di Selat Malaka antara lain perompakan bersenjata, pembajakan, *illegal logging*, *illegal fishing*, *human trafficking*, narkoba dan isu terorisme.

Pelaksanaan patroli udara EIS sampai dengan saat ini masih belum terlaksana dengan ideal hal ini ditunjukkan dengan belum adanya kesamaan jadwal dengan pelaksanaan patroli laut yang terselenggara sebagai Maritime Sea Strait Patrol (MSSP), yang menyebabkan tidak terjalinnya koordinasi dan komunikasi antara unsur TNI AU dan TNI AL secara bersamaan dalam wilayah sasaran.

Guna mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi di Selat Malaka, baik pelanggaran tersebut yang berkaitan dengan kedaulatan ataupun kejahatan transnasional, maka diperlukan adanya upaya-upaya perbaikan dalam penanganan keamanan melalui Operasi Udara EIS. Hal tersebut bisa diselenggarakan antara lain dengan melaksanakan penyegaran kembali terhadap para pelaku baik dari unsur EIS, MSSP, IEG dan MAA. Penyegaran ini dalam rangka untuk mengingatkan kembali bagaimana aturan ataupun peran yang dimainkan oleh masing-masing unsur.

Peneliti memberikan saran beberapa hal agar penanganan keamanan di Selat Malaka melalui EIS oleh TNI AU dapat berjalan lebih efisien dan dapat ditingkatkan. Mabes TNI dapat memfasilitasi dalam pelaksanaan sinkronisasi jadwal patroli udara dengan patroli laut, sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang saling melengkapi antar unsur. Kementerian pertahanan memberikan kelengkapan pesawat TNI AU yang digunakan dalam melaksanakan patroli udara EIS, dengan CTDLs (*Communication Tactical Data Link System*), sehingga memudahkan proses koordinasi selama operasi berlangsung. Bagi instansi yang terlibat dalam penanganan keamanan di Selat Malaka agar menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam mendukung upaya TNI khususnya TNI Angkatan Udara terkait menjaga keamanan di Selat Malaka dan juga sebagai bahan untuk membuat kebijakan berkaitan dengan tindak lanjut dari pelaksanaan EIS berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih atas terbitnya naskah ini pada Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia 2022 sebagai bagian kolaborasi/kerjasama penelitian antara Seskoau dengan Universitas Pertahanan RI.

REFERENSI

- [1] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia
- [2] Undang-Undang Nomor 34 (2004). Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- [3] William N. Dunn (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik
- [4] McNicholas, M. (2008). Maritime Security : An Introduction.
- [5] Laksamana Madya TNI Marsetio, 2011, Kepentingan Nasional di Laut dalam Perspektif Maritime Domain Awareness,
- [6] http://binkorpselaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=34:Kepentingan-nasional-di-laut-dalam-perspektif-maritime-domain-awareness&catid=28:fgd-mda-wakasal, (Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2013)
- [7] Maleong,L (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif
- [8] SBP,D (2019). Naskah Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa. Keputusan Panglima TNI No. Kep 545/V/2019
- [9] MSP (2020). Malacca Straits Patrol Standard Operating Procedures
- [10] Anwar, S. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan Di Bidang Pertahanan. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 4(2), 71–94. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.332>
- [11] Dan, K. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif.
- [12] Edrian, M. (2017). Maritime Domain Awareness.
- [13] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Pertahanan 2015.
- [14] Laporan EIS Satuan. (2021). Skadron Udara 2.
- [15] Mahdi Wahyulianto, R., & Buntoro, K. (2018). OPTIMALISASI PEMANDUAN KAPAL DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM DI SELAT MALAKA.
- [16] Malacca Straits Patrol Standard Operating Procedures. (2020).
- [17] Maleong, L. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- [18] Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif. (1992).
- [19] ReCAAP. (2021). Annual Report Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia 2021. Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Annual Report.
- [20] Republik Indonesia, P. (2003). Undang-Undang No 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara.
- [21] Sulistyani, Y. A. (2019). Diplomasi Pertahanan Littoral States Di Selat Malaka Melalui Kerangka Patroli Selat Malaka. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 9(2), 41. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.563>
- [22] TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa. (2019). Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
- [23] Wicaksa, A. (2020). INTERDEPENDENCE JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES Strategi Keamanan Republik Indonesia di Selat Malaka.
- [24] Wijaya, S. M. I. (2017). Usaha Malsindo Trilateral Coordinated Patrol dalam Menangani Perampokan Bersenjata di Selat Malaka. Journal of International Relations, 3(4), 9–15.